



BANK INDONESIA

Framework Kebijakan Utama Bank Indonesia

Mei 2013

Daftar Isi

I. Kerangka Kerja Kebijakan Utama Bank Indonesia

- 1. Strategi Mengelola Stabilitas Moneter**
- 2. Strategi Mengelola Stabilitas Sistem Keuangan**
- 3. Strategi Mengelola Stabilitas Sistem Pembayaran**
- 4. Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah**

II. Proses Perumusan Kebijakan Utama Bank Indonesia

III. Batang Tubuh PDG Kerangka Kerja dan Proses Perumusan Kebijakan Utama Bank Indonesia

IV. Lampiran

Kerangka kerja kebijakan BI mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran, yg didukung oleh kebijakan ekonomi daerah dan internasional, dalam suatu bauran kebijakan yang optimal untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah dengan mewujudkan stabilitas moneter, memelihara sistem pembayaran yang aman dan efisien serta mendorong SSK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.

**MENCAPAI DAN MEMELIHARA STABILITAS NILAI RUPIAH
UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKESINAMBUNGAN**

**Bauran Kebijakan
Bank Indonesia**

STABILITAS MONETER (SM)

1. Kebijakan Suku Bunga
2. Kebj. Pengelolaan Likuiditas
3. Kebijakan Nilai Tukar
4. Kebijakan Devisa
5. Koordinasi & Komunikasi Kebj.

**STABILITAS SISTEM
PEMBAYARAN (SP)**

1. Penyelenggaraan SP
2. Pengembangan dan Pengaturan SP
3. Surveillance SP
4. Koordinasi & Komunikasi Kebj.

**STABILITAS SISTEM
KEUANGAN (SSK)**

1. Surveillance Sistem Keuangan
2. Kebj. Makroprudensial
3. Pengembangan Pasar, Akses Keuangan dan UMKM
4. Koordinasi & Komunikasi Kebj.

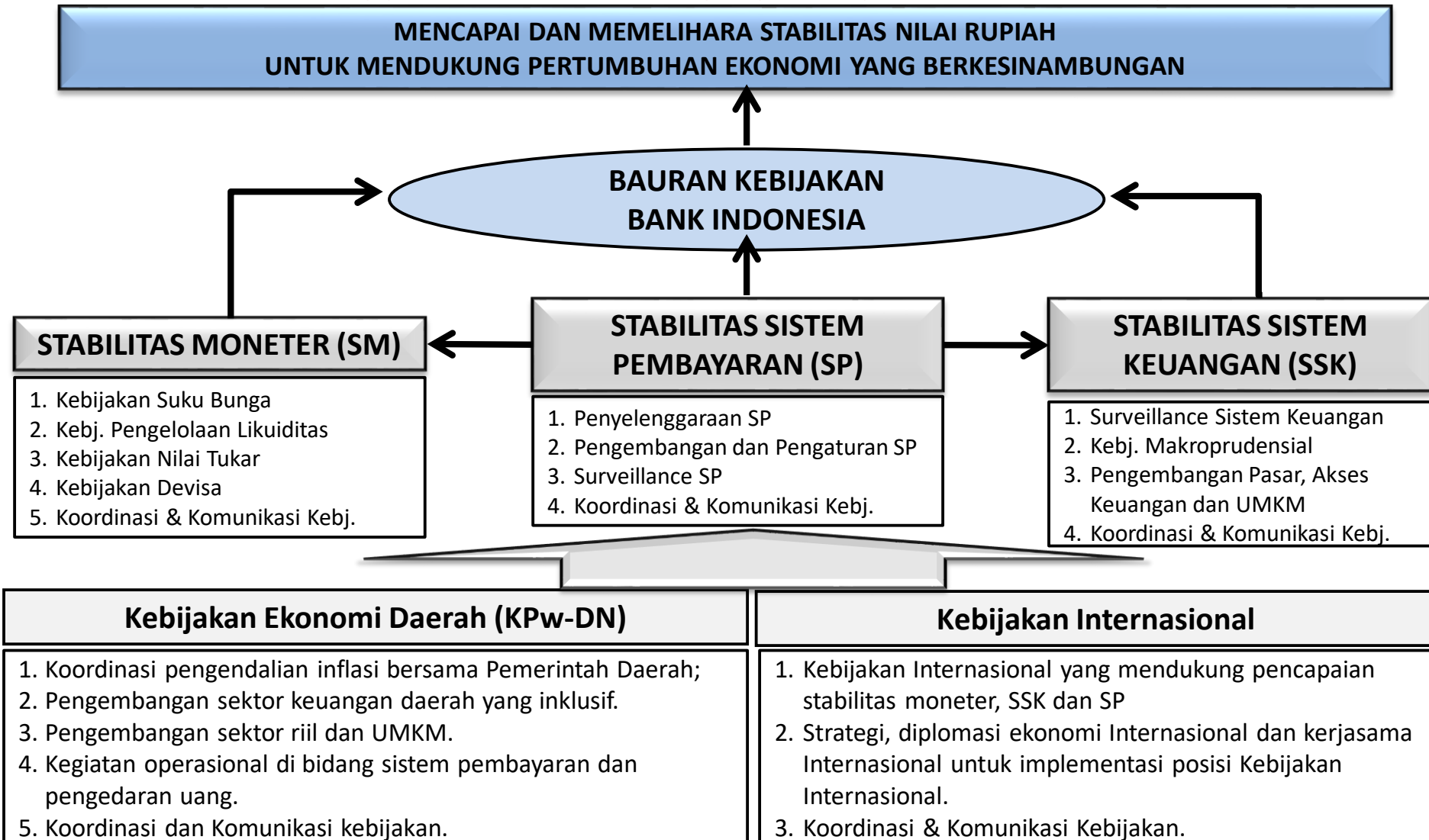
Kebijakan Ekonomi Daerah (KPw-DN)

1. Koordinasi pengendalian inflasi bersama Pemerintah Daerah;
2. Pengembangan sektor keuangan daerah yang inklusif.
3. Pengembangan sektor riil dan UMKM.
4. Kegiatan operasional di bidang sistem pembayaran dan pengedaran uang.
5. Koordinasi dan Komunikasi kebijakan.

Kebijakan Internasional

1. Kebijakan Internasional yang mendukung pencapaian stabilitas moneter, SSK dan SP
2. Strategi, diplomasi ekonomi Internasional dan kerjasama Internasional untuk implementasi posisi Kebijakan Internasional.
3. Koordinasi & Komunikasi Kebijakan.

Kerangka kerja kebijakan BI mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran, yg didukung oleh kebijakan ekonomi daerah dan internasional, dalam suatu bauran kebijakan yang optimal untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah dengan mewujudkan stabilitas moneter, memelihara sistem pembayaran yang aman dan efisien serta mendorong SSK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.



Kebijakan Ek. Daerah

Kebijakan Internasional

Kerangka Stabilitas Moneter

Kerangka Stabilitas Sistem Keuangan

Kerangka Stabilitas SP



- Keb. Suku Bunga (a.l. BI Rate, koridor)
- Kebj. Pengelolaan Likuiditas (a.l GWM)
- Keb. Nilai Tukar (a.l intervensi Valas)
- Kebijakan Devisa (a.l aturan arus modal)

- Surveillance Sist. Keu.
- Keb. Makroprudensial
- Pengembangan Pasar, Akses Keuangan dan UMKM

- Kebj. Pengembangan SP
- Kebj. Pengaturan SP
- Kebj. Penyelenggaraan SP
- Kebj. Surveillance SP

- Sk. Bunga jk. Pendek

- Suku Bunga (jk.pendek)
- Nilai Tukar
- Harga Aset
- Uang Beredar
- Kredit
- Ekspektasi inflasi
- NPI

- Perilaku risiko:
 - Risiko pasar
 - Risiko kredit
 - Risiko likuiditas
- Solvensi
- Risiko Sistemik
- Tk. akses keuangan
- Penyaluran kredit ke UMKM

- Risiko (operasional, setelmen, fraud)
- Volume Transaksi
- Efisiensi

- Stabilitas Moneter:**
- Terjangkarnya prakiraan dan ekspektasi inflasi sesuai sasaran (a.l exp. Inflasi)
 - Terjaganya stabilitas NT yang sesuai dgn kondisi fundamentalnya (a.l volatilitas NT)

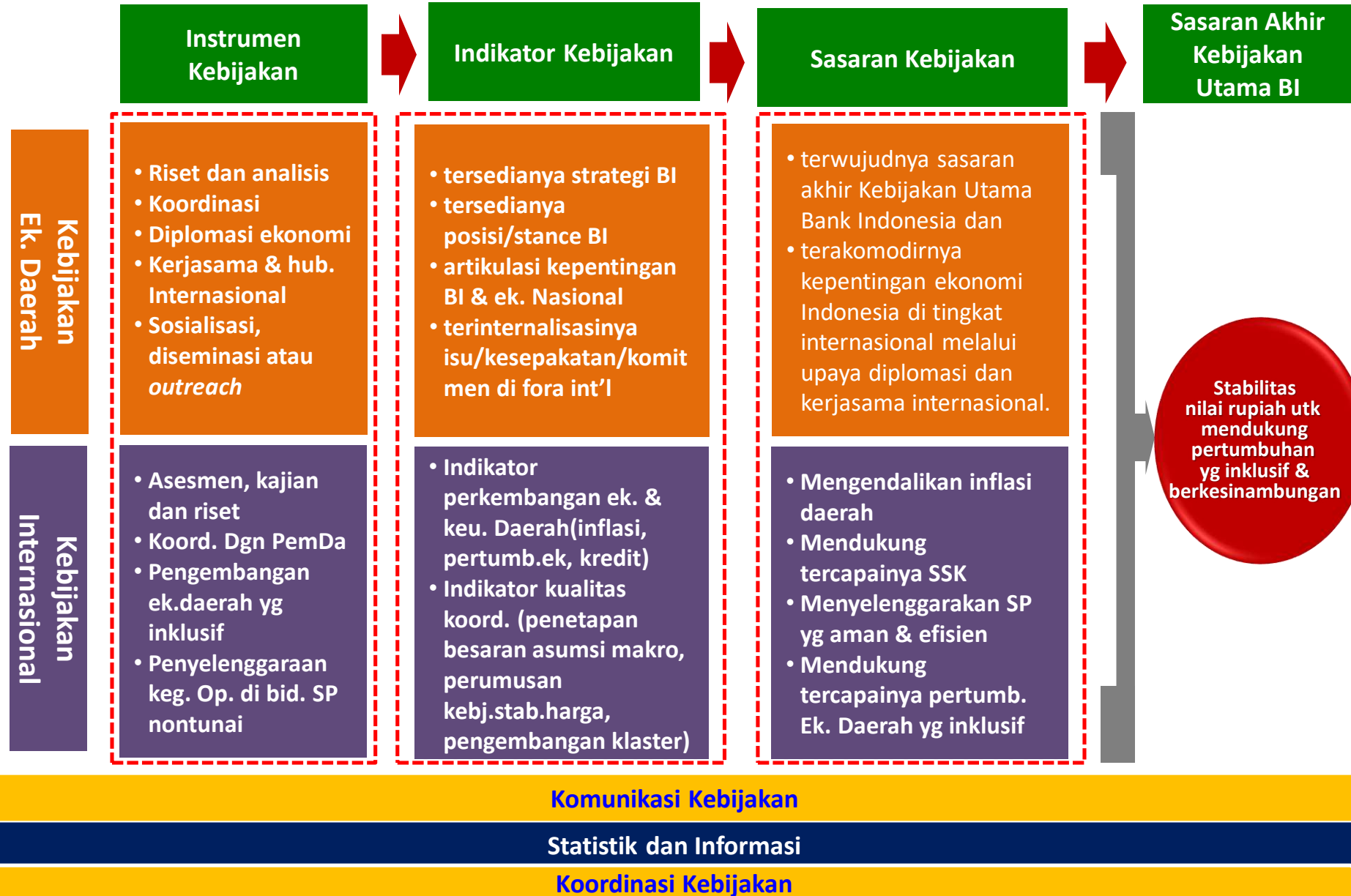
- Stabilitas Sistem Keu.:**
- Sist. Keu yg resilien (a.l indeks tekanan perbankan dan tk. permodalan)
 - Intermediasi yg berjalan baik (a.l gap kredit/GDP, LDR)
 - Sist. Keu. yg Efisien (a.l BOPO, NIM)

- Stabilitas SP**
- SP yg berdaya tahan (a.l tk. Ketersediaan sistem)
 - SP yg terpercaya (a.l tren transaksi nontunai)
 - SP yg efisien (a.l tk. Kecepatan proses setelmen transaksi)

Stabilitas nilai rupiah utk mendukung pertumbuhan yg inklusif & berkesinambungan

Komunikasi Kebijakan		
Statistik dan Informasi		
Koordinasi Kebijakan		
BI-Pemerintah	BI-OJK-LPS	BI: Stabilitas Moneter – SSK - SP

Kerangka Kerja Kebijakan Pendukung Kebijakan Utama Bank Indonesia



**sesuai draf PDG Kerangka Kerja dan Proses Perumusan Kebijakan Utama BI
pasal 2 BAB II Prinsip Kebijakan Utama**

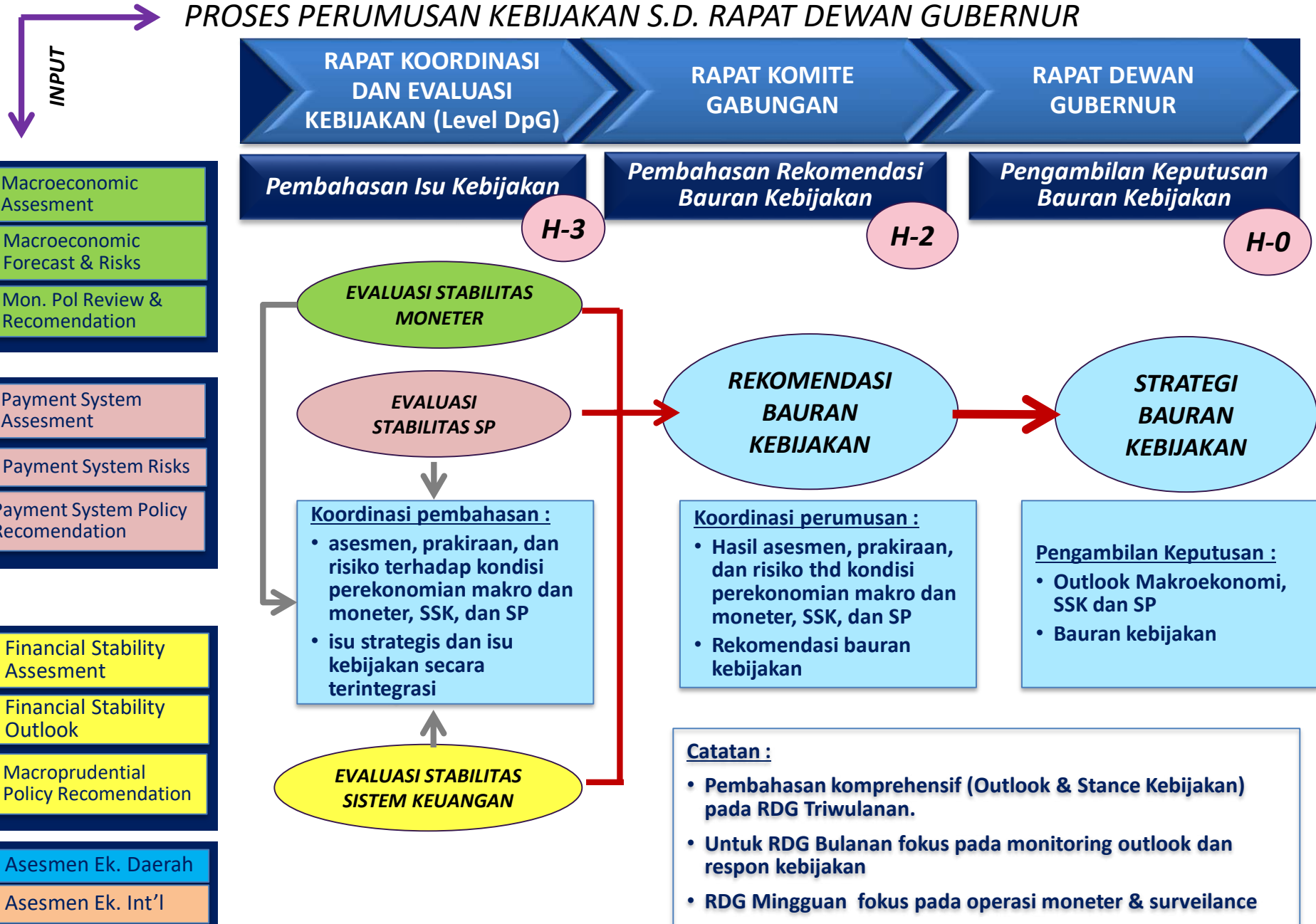
Perumusan Kebijakan Utama Bank Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a.** terintegrasi dan bersinergi dengan baik;
- b.** berorientasi ke depan dan berbasis pengendalian risiko;
- c.** diskresi terbatas (constrained discretion);
- d.** berbasis riset;
- e.** independen, transparan dan akuntabel;
- f.** mempertimbangkan kebijakan umum di bidang perekonomian;
- g.** memperhatikan praktek internasional;

Integrasi dan Perumusan Bauran Kebijakan

8

PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN S.D. RAPAT DEWAN GUBERNUR



Daftar Isi

I. Kerangka Kerja Kebijakan Utama Bank Indonesia

- 1. Strategi Mengelola Stabilitas Moneter**
- 2. Strategi Mengelola Stabilitas Sistem Keuangan**
- 3. Strategi Mengelola Stabilitas Sistem Pembayaran**
- 4. Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah**

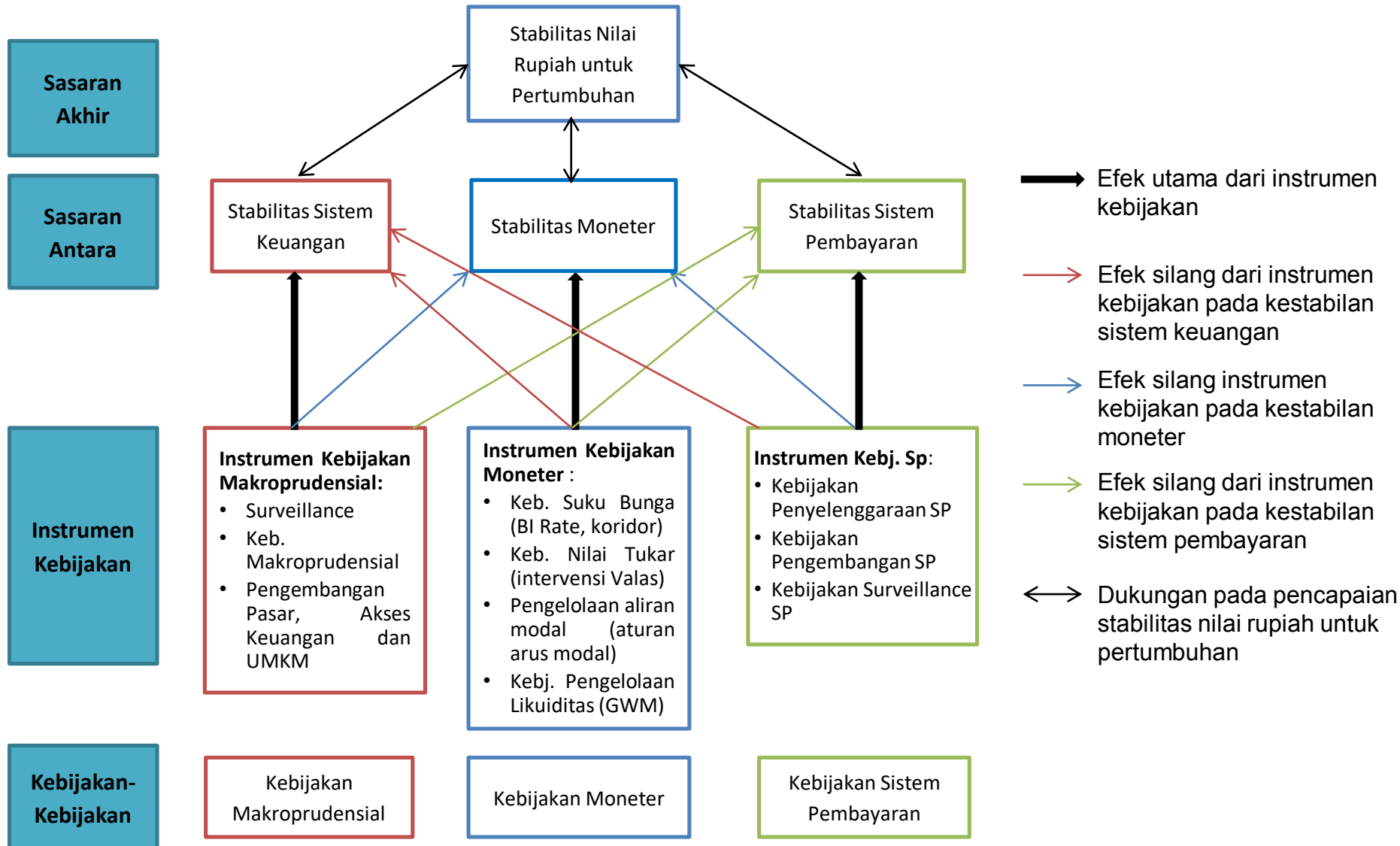
II. Proses Perumusan Kebijakan Utama Bank Indonesia

III. Batang Tubuh PDG Kerangka Kerja dan Proses Perumusan Kebijakan Utama Bank Indonesia

IV. Lampiran

Kebijakan Moneter, Makroprudensial dan SP

Integrasi dan keterkaitan sasaran, kebijakan dan instrumen untuk stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan stabilitas sistem pembayaran...



TERIMA KASIH